

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Wabah yang ditemukan pertama kali di Kota Wuhan China pada akhir tahun 2019 merupakan virus berbahaya yang dikenal dengan Covid-19 (Sari et al., 2020). Kemunculan awal Covid-19 menunjukan penyebaran yang sangat cepat, tahun awal 2020 tercatat 228 lebih negara yang terinfeksi paparan Covid-19 dengan korban sebanyak 175.847.347 jiwa dan sebanyak 3.807.276 jiwa yang meninggal (World Health Organization, 2020). Wabah yang sangat dahsyat dapat menyerang tanpa batas usia dari anak-anak hingga lansia (Fauzi, 2020). Kasus Covid-19 yang terus meningkat berdampak negatif terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi (Setiawan, 2020).

Munculnya kasus penyebaran Covid-19 mendorong pemerintah bergerak secara cepat dalam menangani masalah pandemi (Halim et al., 2021). Penanganan masalah pandemi Covid-19 diperlukan konsep *agile government*, dimana dalam penanganan pemerintah dituntut memiliki kemampuan efisiensi biaya, tindakan cepat dan tepat (Miller, 2021). Penanganan masalah pandemi dirumuskan dengan kebijakan yang adaptif, cerdas, dan efisien (Clarke, 2020). Karakteristik pemerintahan yang tangkas yang dikenal dengan *agile government* yaitu: responsivitas, adaptasi strategis, fokus pada hasil, dan manajemen mengantisipasi masalah masa depan (Reid, 2020). Pelaksanaan konsep *agile government* dapat menciptakan kondisi yang berkelanjutan terhadap keberlangsungan dan sesuai dengan kondisi yang terjadi (Apriliyanti et al., 2021).

Menanggapi pandemi Covid-19 pemerintah perlu menggabungkan sistem tata kelola yang lebih luas yakni dengan melibatkan sektor-sektor non pemerintahan guna untuk memberikan respon berupa penanganan-penanganan dengan lebih cepat (Janssen and Voort,

2020). Mewujudkan dan prinsip *agile governance* dengan komunikasi pemerintah dan sosialisasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas melalui media online maupun media cetak (Apriliyanti et al., 2021). *Agile government* merupakan revolusi birokrasi dalam pemerintahan yang lincah dan cepat dalam menghadapi tantangan di tengah-tengah masyarakat (Younas et al., 2018). *Agile government* dalam pelaksanaannya tidak hanya menekankan pada ide baru, tetapi menekankan pada kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan, kebijakan yang inovatif dengan sumber daya manusia yang berkualitas, dan adanya kolaborasi masyarakat dan pemangku kepentingan (Purwanto, 2019).

Menghadapi status darurat pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Indonesia bergerak dalam upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19 dengan mengadakan Rapat Terbatas bersama Kementerian terkait hingga terbentuklah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang tercantum dalam Keppres Nomor 7 Tahun 2020 dengan menciptakan rumusan strategi dalam penanggulangan pencegahan dengan melakukan *physical distancing*, dikuatkan strategi pertahanan dasar dengan penggunaan masker, adanya penusuran kontak (*tracing*), pemberian edukasi, dan pelaksanaan isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit bagi masyarakat yang positif terpapar Covid-19 (Perbawa, 2021). Pada Tabel 1.1 merupakan data masyarakat pada 6 Provinsi di Pulau Jawa yang terpapar Covid-19.

**Tabel 1.1 Data Covid-19 pada 6 Provinsi di Pulau Jawa**

No	Provinsi	Dirawat	Terkonfirmasi	Sembuh	Meninggal
1	DKI Jakarta	3.368	855.119	838.286	13.465
2	Jawa Barat	6.175	699.185	678.519	14.491
3	Jawa Tengah	13.479	477.894	434.872	29.543
4	Jawa Timur	4.776	391.446	357.537	29.133
5	DIY	4.760	153.275	143.440	5.075
6	Banten	1.561	130.549	126.342	2.646

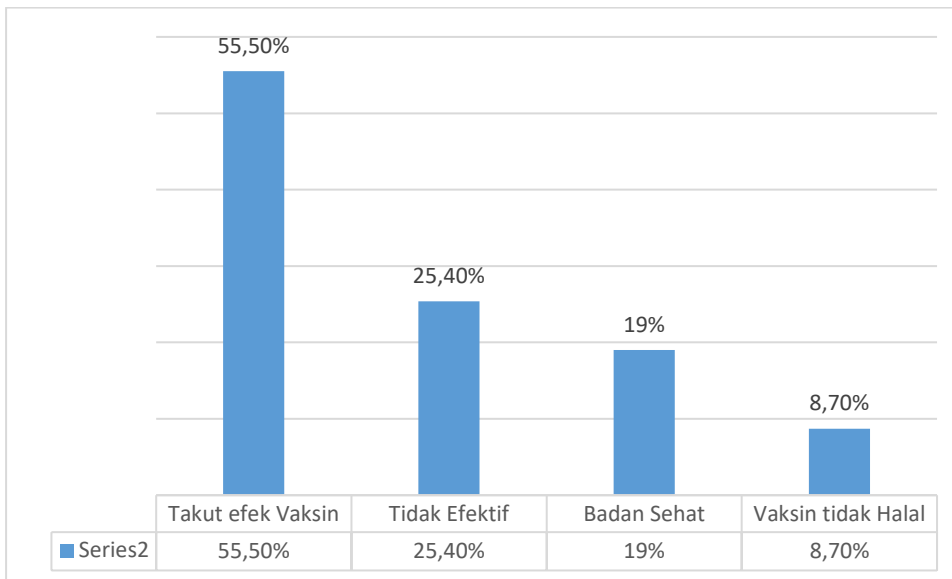
Sumber: (S SatgasCovid-19, 2021) <https://covid19.go.id/>

Data pasien yang terpapar Covid-19 di Pulau Jawa berdasarkan *update* pada tanggal 21 September 2020 bahwa tingginya jumlah masyarakat terpapar Covid-19 dengan urutan tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 855.119. Jawa Barat (699.185), Jawa Tengah

(477.894), Jawa Timur (391.446), DIY (153, 275), dan di Provinsi Banten (130.549) (SatgasCovid-19, 2021a). Pengendalian dan pencegahan Covid-19 merupakan usaha pemerintah dalam mengatasi penyebaran dan usaha untuk menyelamatkan jiwa masyarakat (Indriyanti, 2021). Kesehatan dan keselamatan jiwa merupakan dampak mematikan dari penyebaran Covid-19 (Nicolas, 2021). Upaya yang dapat dilakukan dalam memperkuat sistem pertahanan dalam memutus rantai Covid-19 dengan pelaksanaan Vaksinasi (Nufa, 2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 adalah respon dan ketanggapan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 yang dimulai pada akhir tahun 2020 (Haning et al., 2020).

Ketanggapan Pemerintah dalam pengendalian Covid-19 dengan pengesahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), untuk mengatur kewenangan pemerintah, kementerian/lembaga dan para pejabatnya dalam merencanakan kegiatan Vaksinasi (Rachman & Pramana, 2020). Vaksinasi merupakan titik terang pencegahan Covid-19 yang dimulai pada Januari 2021, diawali dengan vaksinasi Presiden Jokowi, tenaga kesehatan, TNI/Polri, aparat sipil negara, tokoh masyarakat, dan warga sipil lanjut usia (Rahmawati, 2021). Menurut data Satgas Covid-19 per 27 Mei 2021, jumlah penerima vaksin dosis pertama sebanyak 15.703.583 orang, dosis kedua sebanyak 10.359.996 orang, dan Pemerintah menargetkan 181.554.465 orang akan mendapat vaksinasi (Rahmawati, 2021). Gambar 1.1 merupakan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang digelar pada 20-25 Juni mencatat masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak bersedia divaksin yakni sebesar 36,4 persen dengan berbagai ketakutan efek yang ditimbulkan.

**Gambar 1.1 Respon Masyarakat terhadap Vaksinasi Covid-19**



Sumber: (Lembaga Survei Indonesia, 2021).

Lima alasan besar masyarakat tidak bersedia divaksin yaitu masyarakat takut terhadap dampak yang ditimbulkan setelah vaksinasi sebesar 55, 5 persen, masyarakat menilai pemberian vaksin tidak efektif sebesar 25, 50 persen, merasa badannya sehat sebesar 19 persen, dan beranggapan vaksin tidak halal sebesar 9, 9 persen (Lembaga Survei Indonesia, 2021). Pulau Jawa merupakan sasaran dalam percepatan vaksinasi melihat kondisi angka kematian Covid-19 tertinggi disumbangkan oleh lima provinsi di Pulau Jawa yaitu: Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Yogyakarta (Tri Rini, 2021). Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 28 Febuari-8 Maret 2021 dari hasil penelitian menenumukan 27 persen masyarakat di Pulau Jawa tidak bersedia divaksin dengan mayoritas berada di DKI Jakarta dan mencapai 33 % di seluruh Pulau Jawa (Dian Erika, 2021).

Keraguan masyarakat terhadap pelaksanaan Vaksinasi disebabkan oleh banyaknya informasi yang meyebar di tengah-tengah masyarakat yang memunculkan berita kejadian meninggal setelah divaksinasi (Dwi Murdaningsih, 2021). Berbagai hambatan juga ditemui pada daerah termasuk di Pulau Jawa yakni banyaknya masyarakat yang kesulitan terhadap

akses layanan kesehatan, kesulitan administrasi pelaksanaan Vaksinasi, bahkan adanya hambatan pada ketersediaan Vaksin (Mohd Ibrahim, 2021)

Penguatan *Agile Government* dalam Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 penting untuk diteliti, sehingga peneliti tertarik meneliti dan menganalisis penguatan *agile government* dalam implementasi kebijakan Vaksinasi Covid-19: Studi Pada 6 Provinsi di Pulau Jawa dengan menampilkan empat karakteristik pemerintahan yang tangkas *agile government* yaitu: Responsivitas, adaptasi strategis, fokus pada hasil, dan manajemen mengantisipasi masalah masa depan (Reid, 2020). Didukung kebaruan analisis data dengan bantuan NVivo 12 Plus yang dapat menghasilkan data bersifat terbuka dan pemutakhiran ilmu pengetahuan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti menyimpulkan untuk meneliti dan merumuskan permasalahan mengenai bagaimana penguatan *agile government* dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19: Studi pada 6 Provinsi di Pulau Jawa.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penguatan *agile government* dalam implementasi kebijakan Vaksinasi Covid-19: Studi pada 6 Provinsi di Pulau Jawa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu dan memberikan kontribusi positif sebagai rujukan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan dalam mengetahui penguatan *agile government* dalam implementasi kebijakan Vaksinasi Covid-19: Studi pada 6 Provinsi di Pulau Jawa.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi bagi para pembaca atau khalayak umum dalam memberi masukan terhadap penguatan *agile government* dalam implementasi kebijakan Vaksinasi Covid-19: Studi pada 6 Provinsi di Pulau Jawa.